

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- A, Qirom Meilala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Jakarta, Liberty, 1985.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, edisi kedua, Yogyakarta, Andi, 2012.
- Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Duhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Hukum, Asas-Asas, dan Norma Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Peruri, 2008.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cetakan ketiga, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, Jakarta, Redcarpet, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Otoritas Jasa Keuangan, Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Ref Publisher, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Ref Grafika, 2016.
- Joseph F. Sinkey Jr, *Commercial Bank Financial Management*, New York, Macmillan Publishing Co, Inc, 1983.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004.

- \_\_\_\_\_, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, cetakan kedua, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Februari 2004.
- Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke XXX, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung, Alumni, 2005.
- \_\_\_\_\_, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 1983.
- Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar, Indonesia Prime, 2017.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Program Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cetakan ke - 2, Bandung, Alumni, 1986.
- Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, *Perjanjian Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung, Alumni, 2007.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta, Refika Aditama Press, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2013
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2006.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- R. Cotterreell, *The Politic of Jurisprudence : A Critical Introduction to Legal Philosophy*, 2nd edition, Oxford University Press, 2003.

- R.M. Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan Area University Press, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Buku Kompas, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Bina Cipta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, UI-Press, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-7, Jakarta, RajaGrafindo Persada, September 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2003.
- Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan Totok Budi Santoso, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, edisi 2, Jakarta, Salemba Empat, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Jakarta, Intermasa, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan ke-2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 1994.

Surono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni, 2006.

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, Fourth edition, 1960.

Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung, Books Terrace & Library, 2005.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekooia Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118)

### **Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah**

Aan Handriani, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pamulang Law Review, volume 2, Issue 2, November 2019.

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Januari-Maret 2014, Vol. 8 No. 1.

Johannes Ibrahim, *Dilematis Penerapan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 24, No. 1 Tahun 2005

Lambang Siswandi, *Kreditur dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 1 Feb-Juli 2019.

Mohammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit*, Lec Crimen, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), volume 6, Nomor 1 Tahun 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Buletin Yuridika, Volume 18 No. 3, Mei 2003.

Tan Kamelo, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Perdata, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2 September 2011.

### **Kamus dan Ensiklopedia**

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, tenth edition, Thomson Reuters, St. Paul, MN, USA, 2009.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tertanggal 24 Februari 2016,

Pengadilan Negeri Tangerang No. 196/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Tng tanggal 19 Mei 2015.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 03/Pts/BPSK-Tangsel/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.

